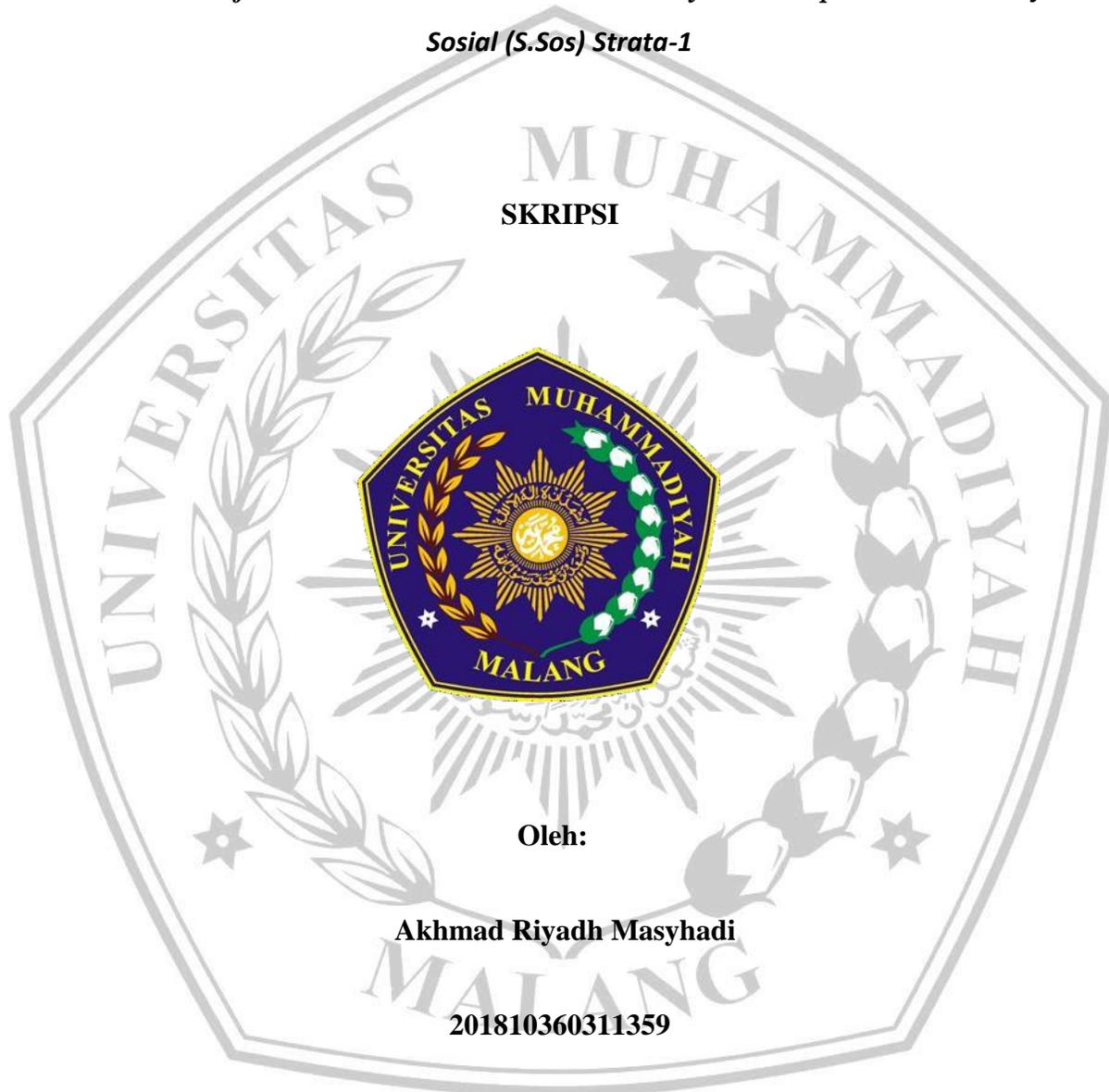


**TRANSFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA: ANALISA FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI LEGALISASI GANJA SEBAGAI LANGKAH
DESEKURITISASI DI THAILAND**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Strata-1*



SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Riyadh Masyhadi

201810360311359

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

TRANSFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA: ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEGALISASI GANJA SEBAGAI LANGKAH DESEKURITISASI DI THAILAND

Diajukan Oleh :

AKHMAD RIYADH MASYHADI

201810360311359

Telah disetujui
Pada Senin, 6 Mei 2024

Pembimbing I



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt



Nizamuddin Amir Rijal, M.Hub.Int

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Akhmad Riyadh Masyhadi
201810360311359

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Jumat 26 April 2024
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int** ()
2. **Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int** ()
3. **Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt** ()

Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Akhmad Riyadh Masyhadi
NIM : 201810360311359
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Transformasi Kebijakan Narkotika di Thailand: Legalisasi Ganja Sebagai langkah Sekuritisasi terhadap Permasalahan Narkotika
Pembimbing : 1. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St

Kronologi Bimbingan:

Tanggal	Pembimbing	Keterangan
22 Februari 2024		Konsultasi judul dan latar belakang masalah
07 Maret 2024		Revisi struktur penulisan, Latar belakang masalah, dan pembahasan
23 Maret 2024		Revisi teori dan bab pembasan
28 Maret 2024		ACC untuk sidang Tugas Akhir

Malang, 02 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Riyadh Masyhadi
NIM : 201810360311359
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul : Transformasi Kebijakan Narkotika di Thailand: Legalisasi Ganja Sebagai langkah Sekuritisasi terhadap Permasalahan Narkotika adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 April 2024
Yang Menyatakan,



Akhmad Riyadh Masyhadi

ABSTRAK

ABSTRAK

Akhmad Riyadh Masyhadi, 2024, 201810360311359, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, "Transformasi Kebijakan Narkotika di Thailand: Legalisasi Ganja Sebagai langkah Sekuritisasi terhadap Permasalahan Narkotika". Dosen Pembimbing I: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St

Permasalahan narkotika menjadi permasalahan yang hampir dihadapi oleh seluruh negara, narkotika yang ilegal kemudian memberikan ancaman-ancaman lainnya melalui penyebaran pasar gelap, permasalahan sosial, serta perekonomian negara. Thailand merupakan negara yang memiliki permasalahan serius terhadap narkotika, dimulai dengan letak geografis Thailand yang secara de facto merupakan tempat transaksi pasar gelap di Asia Tenggara, kemudian masalah sosial yang timbul terhadap kebijakan non-toleran pada 2003 yang kemudian menimbulkan masalah perekonomian menjadikan narkotika adalah ancaman yang serius di Thailand. Dalam studi kasus ini penulis menggunakan kerangka teori Sekuritisasi untuk mengkaji bagaimana transformasi kebijakan narkotika, dimana legalisasi ganja dapat dinilai sebagai langkah pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkotika di Thailand. Dalam studi ini penulis menggunakan metode deskriptif dan penumpukan data dengan metode studi pustaka. Selain itu penulis juga menggunakan variable-variable teori sekuritisasi dalam melakukan penelitian ini yaitu, aktor sekuritisasi, *referent object*, ancaman eksistensial, *speech act*, dan *extraordinary measures*. Dalam pembahasannya penulis menjabarkan bagaimana permasalahan akibat narkotika dijadikan ancaman oleh aktor sekuritisasi, sehingga dengan adanya ancaman tersebut kebijakan legalisasi ganja adalah langkah sekuritisasi negara Thailand untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari ancaman narkotika yang beredar.

Kata Kunci: Thailand, Sekuritisasi, Legalisasi Ganja, Transformasi Kebijakan Narkotika

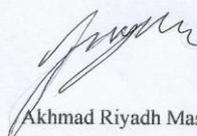
Malang, 02 April 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Peneliti,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St



Akhmad Riyadh Masyhadi

ABSTRACT

ABSTRACT

Akhmad Riyadh Masyhadi, 2024, 201810360311359, Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Malang, International Relations Study Program, " Transformation of Narcotics Policy in Thailand: Marijuana Legalization as a Securitization Step to the Narcotics Problem ". Supervisor I: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St

The problem of narcotics is a problem that almost all countries face, illegal narcotics then pose other threats through the spread of the black market, social problems and the country's economy. Thailand is a country that has serious problems with narcotics, starting with Thailand's geographical location which is de facto a place for black market transactions in Southeast Asia, then social problems that arose due to the non-tolerant policy in 2003 which then gave rise to economic problems making narcotics a threat. serious in Thailand. In this case study the author uses the Securitization theoretical framework to examine the transformation of narcotics policy, where the legalization of marijuana can be seen as a government step to resolve the narcotics problem in Thailand. In this study the author used a descriptive method and collected data using the library study method. Apart from that, the author also uses securitization theory variables in conducting this research, namely, securitization actors, reference objects, existential threats, speech acts, and extraordinary measures. In this discussion, the author explains how problems caused by narcotics are made into a threat by securitization actors, so that with this threat the policy of legalizing marijuana is a securitization step for the Thai state to be able to resolve the problem of the threat of circulating narcotics.

Keyword: Thailand, Securitization, Marijuana Legalization, Narcotics Policy Transformation

Malang, 02 April 2024

Approved,
Supervisor,

Researcher,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St



Akhmad Riyadh Masyhadi

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Transformasi Kebijakan Narkotika: Analisa Faktor yang mempengaruhi Legalisasi Ganja sebagai langkah Desekuritisasi di Thailand”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan tugas akhir ini merupakan proses yang sukar nan terjal. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang sangat berjasa, yakni Bapak tercinta Bapak Muadz bin Abubakar Masyhadi dan Ibu Tercinta Ibu Hikmah Umar Masyhadi, Terimakasih atas kepercayaan, do'a, cinta, semangat, motivasi dan nasihat yang taida hentinya diberikan kepada anaknya. Terimakasih juga kepada Adik saya yang tercinta Saffa Kamila Masyhadi besertakeluarga lainnya yang senantiasa memberikan support baik moril maupun materil sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Syasya Yuania Fadila Mas'udi M. Strat.ST. selaku dosen pembimbing terbaik, yang telah membimbing dengan sabar serta memberikan saran yang sangat membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Dedik Fitra Suhermanto, M Hub. Int . dan Bapak Najamuddin Khairurijal, M. Hub. Int. selaku dosen penguji yang banyak memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
4. Seluruh jajaran Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan staff dari tim Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
5. Kepada Sahabat Wala-wala, Ramadhan Dwi Januar Fitra, Firsta Reynalda, Aurora More, Riqzillah Rani dan lain-lain terima kasih sangat banyak saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan, para sesepuh-sesepuh yang telah membantu, mengajar, menasehati, membimbing dan memberikan banyak ilmu serta saran kepada penulis dalam membuat skripsi ini.
6. Kepada kawan-kawan HIMAHl periode Bharata dan Rising Force terima kasih sangat banyak saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan, para sesepuh-sesepuh yang

telah membantu, mengajar, menasehati, membimbing dan memberikan banyak ilmu serta saran kepada penulis dalam berproses di organisasi

7. Kepada Sahabat karib dalam suka duka, keberkahan dan keterpurukan Ferico Alfiari Rustiono terima kasih sangat banyak saya ucapkan kepada teman seperjuangan, para sesepuh-sesepuh yang telah membantu, mengajar, menasehati, membimbing dan memberikan banyak ilmu serta saran kepada penulis dalam membuat skripsi ini.
8. Kepada kawan baik, sahabat, saudara, dan mentor terbaik saya Huma Syaana Indie terima kasih telah memberikan saya kesempatan berproses bersama anda di HIMAAHI kelak seluruh ilmu yang engkau berikan akan saya kenang dan akan saya terus terapkan.
9. Kepada adik-adik ku, saudara-saudari ku dari Departement HUMAS HIMAAHI Rising Force terima kasih sangat banyak saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan, para sesepuh-sesepuh yang telah membantu, mengajar, menasehati, membimbing dan memberikan banyak ilmu serta saran kepada penulis dalam berproses sebagai pemimpin dalam organisasi
10. Teruntuk Shofia Alhamid sebagai pasangan yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan semangat dan waktunya untuk menemani saya degan penuh rasa cinta serta kasih sayang dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Jannatul Firdaus Bahmid sebagai sahabat yang selalu menyemangati dan memberi dukungan nan nasehat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semoga kepada kalian semua yang telah saya sebutkan namanya selalu diberikan keberkahan dan kesehatan serta rezeki yang berlimpah nan halal sehingga selalu bisa berada di jalan Allah Azza Wa Jalla, aamiin
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doinng all this hard work, I wanna thank me for having no days off wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

Malang, 4 Juni 2024



Akhmad Riyadh Masyhadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
LEMBAR PLAGIASI	xi
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Teori/Konsep	20
Desekuritisasi	20
C. Metodologi	24
D. Hasil dan Pembahasan	24
Narkotika Sebagai Bahasan Keamanan Bagi Thailand	24
Transformasi Kebijakan narkotika, Legalisasi Ganja di Thailand	28
Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Ganja, Langkah Desekuritisasi	30
E. Kesimpulan	36
Daftar Pustaka	38

LEMBAR PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/089/HI/FISIP-UMM/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Akhmad Riyadh Masyhadi
NIM : 201810360311359
Judul Skripsi : Transformasi Kebijakan Narkotika: Analisa Faktor yang mempengaruhi Legalisasi Ganja sebagai langkah Desekuritisasi di Thailand
Dosen Pembimbing : 1. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	12%

*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

15 Mei 2024
K. Prof. Dr. H.

Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutami No. 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 148 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA: ANALISA FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI LEGALISASI GANJA SEBAGAI LANGKAH
DESEKURITISASI DI THAILAND**

Akhmad Riyadh Masyhadi

Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science

University of Muhammadiyah Malang

Email: riyad.mashadi@gmail.com

Abstract

This research aims to explain why the legalization of marijuana was carried out by the Thai government which previously had problems with narcotics, illegal narcotics then posed other threats through the spread of the black market, social problems, and the country's economy Anutin Charnvirakul as a figure who made this policy change became an important figure in the discussion of this research. The researcher uses the theory of desecuritization put forward by the Copahagen School to analyze the factors that influence the cannabis legalization policy. In this study, the author used a descriptive method and collected data using the literature study method. Based on the theory used, the research found that there is a change in attitude and language carried out by the Thai government towards narcotics, especially marijuana. Policy makers, especially Anutin, no longer see it as an illegal substance but as a controlled herbal plant. This change is in line with the emergence of a new paradigm regarding the use of marijuana in the medical, economic and social fields. This change in attitude then led to the desecuritization of issues carried out by the Thai government against marijuana, which is the background of Anutin Charnvirakul's actions in regulating marijuana in narcotics policy in Thailand

Keywords : *Thailand, Desecuritization, Marijuana Legalization, Narcotics Policy*

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkotika kerap terjadi di berbagai negara, permasalahan tersebut bisa banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan internal bagi suatu negara, baik itu permasalahan dalam sektor ekonomi, sosial, bahkan stabilitas politik. Salah satu permasalahan narkotika adalah *Drugs Trafficking* atau perdagangan ilegal narkotika menjadi sebuah fenomena yang kerap dialami oleh negara-negara yang memiliki perbatasan yang relatif dekat. Perdagangan ilegal narkotika merupakan contoh perkembangan kejahatan yang memunculkan kekhawatiran dalam mencapai dunia yang lebih aman, tentram, damai, dan bersejahtera. Perdagangan ilegal tersebut bahkan telah masuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime (TOC)*. TOC sendiri biasanya dilakukan oleh aktor *non-state* yang menimbulkan dampak besar terhadap kekhawatiran masyarakat terhadap rasa keamanan. Kejahatan ini juga berdampak kepada keamanan dalam negeri yang memiliki potensi merusak kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi (Ilham Prisgunano, 2012,; 21 dalam jurnal Jainah, 2013)

Berbagai upaya pengendalian terhadap narkoba telah digaungkan dan diterapkan, pada intinya permasalahan narkoba berada pada masalah penawaran dan permintaan. Para praktisi kebijakan lebih memilih bahwa strategi *supply-side reduction* adalah penerapan kebijakan yang paling efektif, sedangkan bagi kalangan akademisi dalam menghadapi permasalahan narkoba diperlukan kebijakan yang bersifat *demand reduction* atau kolaborasi dari kedua sifat kebijakan tersebut. (Djarmiko, 2023)

Dalam perkembangan isu mengenai narkoba selalu membahas tentang narkoba, pengguna, produsen, dan pedagang yang kemudian dianggap sebagai ancaman eksistensial. Pada mulanya permasalahan narkoba hanya dianggap sebagai masalah penggunaannya saja, namun melalui perkembangan zaman muncul permasalahan baru seperti; organisasi perdagangan narkoba dan teroris narkoba, kedua hal tersebut dapat dilihat sebagai pihak paling berbahaya dalam masalah narkoba.

Negara Thailand menjadi negara yang memiliki permasalahan narkotika tersebut, permasalahan tersebut didukung atas letak geografis Thailand yang masuk dalam kawasan *Golden Triangle* yang terletak di bagian utara Thailand yang berbatasan dengan Laos bagian barat, Myanmar bagian timur, hal tersebut menjadikan bahwa peredaran narkoba adalah permasalahan serius yang dihadapi oleh Thailand. Wilayah *Golden Triangle* memang telah menjadi tempat sebagian besar opium ilegal dunia berasal, tidak hanya opium melainkan ganja. Namun dengan

terus berkembangnya kasus kejahatan narkoba ini menandakan bahwa dengan adanya pasar dan adanya permintaan konsumen, maka tidak akan mudah menghentikan pasar gelap.

Wilayah *Golden Triagle* memang menjadi jembatan utama perdagangan narkoba di Thailand, interkasi sosial telah terbangun sejak lama, dimana masyarakat telah memanfaatkan budidaya dari opium, ganja dan kratom, hal tersebutlah yang membuat kasus penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat menjadi perhatian. Pihak berwenang Thailand sejak dahulu telah memberlakukan berbagai upaya penyitaan dan juga pengamanan terhadap jenis-jenis narkotika:



Sumber: Reported Data Seizures, United Nations On Drugs and Crime ([dp-drug-seizures | dataUNODC](https://www.unodc.org/data-drug-seizures/))

Tabel statistik diatas merupakan hasil dari pemberantasan dan penyitaan dari sindikat narkoba yang dilakukan pihak berwenang Thailand yang sudah di data oleh *United Nations On Drugs and Crime (UNODC)*. Data tersebut dilakukan terhadap beberapa kasus penyitaan dari beberapa jenis narkotika yang paling umum dan banyak ditemukan di Thailand. Jenis narkotika Metafetamin, Opium, dan Ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak diamankan oleh aparat. Terlihat adanya kenaikan maupun turunan yang terjadi diantara pada zat narkotika Metafetamin dan Ganja. Sejak tahun 2015 narkotika Metafetamin menunjukkan kenaikan hingga tahun 2018, dimana kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 64,804.00 kilogram Metamefatmin yang berhasil diamankan. Sedangkan Ganja sendiri juga mengalami gaya statis dalam penyitaannya, namun paling banyak justru terjadi di tahun 2018 sebanyak 39,997.00 kilogram. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus narkoba dalam kurun waktu 2019-2015 telah mengalami lonjakan yang signifikan dari setiap tahunnya.

Untuk menghadapi permasalahan narkoba, Thailand juga melakukan banyak sekali kebijakan dan menentukan sikapnya, salah satu sikap Thailand adalah menyatakan perang terhadap peredaran narkoba. Pada tahun 1979 pemerintah Thailand mengeluarkan undang-undang pengawasan narkoba melalui amanat dari Pemerintah Amerika Serikat lewat *Office of Narcotic Control Board (ONCB)*. Peraturan tersebut kemudian memasukan ganja sebagai salah satu dari 108 jenis psikotropika dan menjadi cikal bakal dari kebijakan “*War on Drugs*”. Kebijakan tersebut diterima pemerintah thailand sebagai langkah keamanan dalam mengatasi permasalahan *drug trafficking* yang berada di kawasan *Golden Triangle*.(Kama et al., 2019) Akibatnya Thailand kemudian menjadi negara yang sangat konsen terhadap penggunaan obat-obatan terlarang tersebut salah satunya ganja, hingga pada akhirnya pada tahun 2003 Thailand kemudian memberlakukan kebijakan *war on drugs* dengan menyertakan perangkat polisi, militer, dan masyarakat.

Dengan adanya pengaruh dari Amerika Serikat dalam penerapan melawan kejahatan narkoba, Amerika Serikat kemudian memberikan bantuan penuh berupa pendanaan, bantuan penegakan hukum, serta pendanaan perangkat tentara kerajaan, polisi perbatasan, dan polisi provinsi. Upaya tersebut kemudian diganaskan pada tahun 2003 di era kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kemudian melakukan kerjasama dengan Polisi, Militer, dan Masyarakat untuk bersama-sama melaporkan para pengguna obat-obatan terlarang. Dalam memimpin kebijakannya, Perdana Menteri Thaksin memang dikenal menggunakan tangan besi dan *zero tolerance* untuk dapat memberantas kejahatan narkoba di negerinya. Dalam pidatonya Perdana Menteri tersebut menyerukan untuk memberantas tanpa adanya ampunan “*Untuk melawan obat-obatan terlarang kita memang harus menggunakan tangan besi, karena obat-obatan terlarang sangat berbahaya untuk anak anak kita. Jangan ada belas kasihan, karena menjadi kejam terhadap mereka tidaklah merupakan hal yang buruk dan jika ada kematian diantara penyelundup, hal itu sangatlah normal*” (Phongpaichit, 2003 dalam kama et al., 2019a)

Namun hal itu malah memberikan dampak negatif kepada masyarakat, petani banyak kehilangan penghasilan dari implementasi kebijakan tersebut, bahkan terdapat lebih dari 2.800 korban yang berjatuh karena kasus ganja, bahkan diantaranya bukanlah sebagai pengguna maupun pengedar, melainkan adalah banyak *miss information* dengan adanya pemalsuan daftar hitam oleh sebagian oknum(Kama et al., 2019b)

Sayangnya, walaupun pemerintah Thailand telah memberlakukan kebijakan yang bersifat *zero tolerance* hal tersebut tidak menurunkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan bahkan menambah permasalahan baru dalam kasus pelanggaran HAM. Satu tahun tepatnya pada tahun 2004, Thailand kemudian mendapatkan kecaman dari *The U.S State Departement* yang

mengatakan bahwa tindakan pelanggaran HAM paling buruk terjadi di Thailand dengan diberlakukannya kebijakan keras terhadap narkoba tersebut. Sejatinya, Thailand dengan memberlakukan kebijakan *War on Drugs*, ikut andilnya dalam kerjasama ASEAN untuk menciptakan ASEAN Bebas Narkoba hingga saat ini adalah bentuk aktifitas negara Thailand dalam menghadapi sindikat narkoba.

Pada tahun 2016, Menteri Hukum Thailand, Paiboon Kumchaya menyatakan bahwa kebijakan mengenai perang terhadap narkoba gagal sehingga diperlukan metode penanganan lain terhadap penyalahgunaan narkoba. Dasar Kumchaya mengatakan bahwa kegagalan tersebut adalah sejak di terbitkannya kebijakan berperang terhadap narkoba, tidak memberikan hasil yang memuaskan, alih alih berhasil menggusur bandar narkoba dan mengurangi pecandu, malah kian banyak warga Thailand yang terjerat narkoba. Selain itu juga, permasalahan narkoba bukan hanya terkait penyebarannya saja, melainkan ada permasalahan terhadap perekonomian negara.

Dalam menghadapi permasalahan narkoba, pemerintah Thailand juga wajib mengurus anggaran untuk menghadapi permasalahan narkoba. Adanya peningkatan anggaran terkait narkoba, mulai dari rehabilitasi, edukasi, pengamanan dan lainnya. Hal tersebut menjadi permasalahan adanya pengeluaran negara yang besar terkait narkoba namun keberadaan pasar tetap masih berjalan.

Beberapa tahun terakhir, Thailand telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai permasalahan narkoba, salah satunya ganja, Thailand menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memberlakukan kebijakan legalitas pada tanaman *cannabis* / mariyuana yang biasa disebut dengan ganja. Pada 25 Desember 2018 menjadi awal Parlemen Thailand menyetujui penggunaan ganja dalam bidang medis. Kemudian kebijakan tersebut mengalami perkembangan pada Maret 2019 setelah menangnya partai politik Anutin Charnvtrakul yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, pada tahun tersebut Thailand menaikkan level legalisasi tanaman ganja medis dengan merencanakan pemberian izin kepada semua warga Thailand untuk dapat menanam 6 tanaman ganja di rumah dan kemudian dapat menjual hasil panen kepada pemerintah untuk dijadikan bahan dari ganja medis. (Ananda, 2022)

Rencana tersebut kemudian sukses dengan keluarnya peraturan baru mengenai tanaman ganja, peraturan Kementerian Kesehatan Thailand yang disebut dengan *Notification Re: Specification of Type 5 Narcotics B.E 2565 (2022)*. Peraturan tersebut lebih spesifik mengatur tanaman ganja yang dapat dimiliki, dan dibudidayakan oleh masyarakat Thailand, dalam peraturan tersebut tanaman ganja yang memiliki kandungan THC atau *tetrahydrocannabinol* dibawah 0.2 % tidak termasuk dalam golongan narkoba. Peraturan mengenai narkoba di Thailand pada

awalnya diatur oleh Undang-Undang Narkotika B.E 2522 Tahun 1979, dalam isi perundangan tersebut Thailand mengklasifikasi narkotika ke dalam 5 kategori. Narkotika dalam kategori 1-4 termasuk *heroin, amfetamin, metamfetamin, morfin, anhidrida asetat* dan *asetil klorida*. Sedangkan yang termasuk dalam kategori 5 adalah zat narkotika yang tidak termasuk dalam kategori 1-4 dari Undang-undang Narkotika Thailand tersebut, contohnya adalah ganja, kratom (*Mitragyna Speciosa*), opium, jamur ajaib, dan salah satu atau semua bagian ganja/kratom. (Lutfiyani, Dini et al., 2023)

Peraturan baru Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand *Notification Re: Specification of Type 5 Narcotics B.E 2565 (2022)* menerangkan bahwa yang masih dalam daftar narkotika kategori 5 adalah ekstra ganja dengan THC diatas 0,2% (Notification Of The Ministry of Public Health, Re: Prescribing the List Of Category 5 Narcotics, B.E 2565 (2022)). Peraturan ini menjadikan tanaman ganja telah resmi menjadi tanaman “herbal terkontrol” yang berada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand. Secara historis masyarakat Thailand telah menggunakan tanaman ganja sebagai bahan budaya rekreasi, tujuan industri baru, serta ramuan obat, ganja di Thailand dipercaya dapat mengobati masalah depresi, stress, rasa sakit, dan kelelahan. Selain itu ganja juga digunakan sebagai masakan tradisional hingga menjadi bahan tekstil (Aroonsrimorakot et al., 2019), namun semuanya telah berubah semenjak akhirnya thailand mengeluarkan kebijakan yang menentang dan memasukan ganja sebagai salah satu zat narkotika

Berangkat dari sejarah historis serta aktifnya negara Thailand dalam penanggulangan kejahatan narkoba, dan berkembangnya paradigma baru mengenai legalisasi ganja yang dapat dilihat dari segala aspek merupakan tujuan utama penilitan ini. Penilitan ini menjadi penting karena Thailand telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan narkoba di negaranya, namun dengan adanya peraturan yang berbanding 180 derajat tersebut dan berkembangnya paradigma mengenai legalisasi ganja menjadi pertanyaan penulis apa saja faktor yang mempengaruhi legalisasi ganja di Thailand.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu atau Literatur Review untuk dapat membantu dalam menjalankan penelitian. Pada penelitian pertama, peneliti menggunakan tulisan milik Villia Sekar Ananda yang berjudul “Analisis Kebijakan Legalisasi Ganja Di Thailand Pada Tahun 2022 Di Tengah Agenda *War On Drugs*”. Tulisan ini membantu peneliti untuk memahami penjelasan dan sejarah bagaimana perkembangan dan historis dari kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan narkotika di Thailand. Dalam tulisan ini dijelaskan, Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang berani bertindak dan mengambil pendekatan baru dalam permasalahan narkotika. Narkotika khususnya ganja telah

menjadi primadona bagi Thailand, secara historis masyarakat telah menggunakan ganja sebagai bahan-bahan tradisional, namun dengan adanya pengaruh dari luar seperti Amerika dan PBB, menjadikan ganja termasuk dalam kategori Narkotika yang dilarang. Pada tahun 2019, Thailand kemudian melakukan langkah yang terbilang berbanding terbalik dengan kebijakan sebelumnya, Thailand kemudian mengeluarkan ganja dalam daftar narkotika. Peneliti kemudian mengkaji kebijakan legalisasi ganja ditengah agenda War On Drugs yang dilakukan oleh kawasan ASEAN.(Ananda, 2022)

Selanjutnya, Penelitian kedua yang berjudul “Kepentingan Thailand dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja” oleh I Putu Sasya Kama, Anak Agung Ayu Intan Prameswari, dan Sukma Sushanti. Penelitian ini berfokus kepada menganalisa kepentingan Pemerintah Thailand yang menjadi latar belakang dari penerpan kebijakan legalisasi ganja pada tahun 2019. Dalam penulisan jurnal tersebut disebutkan bahwa kepentingan ekonomi dan keamanan adalah alasan utama dalam kebijakan legalisasi tersebut. Dalam artikel ini juga penulis menjabarkan awal mula kebijakan *War On Drugs* yang merupakan kebijakan yang diperangaruhi oleh Amerika Serikat, selain itu dalam jurnal tersebut juga dijelaskan posisi Thailand yang merupakan bagian dari ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD). Dengan banyaknya masalah serta tidak sinkronnya kebijakan sebelum adanya legalisasi, legalisasi ganja dinilai mampu memberikan jawaban khususnya kesejahteraan masyarakat melalui terbuka lahan baru ganja, kesempatan pengembangan perekonomian negara yang sebelumnya lesu karena pandemi covid-19 dan berkurangnya anggaran negara yang sebelumnya digunakan untuk memerangi narkotika.(Kama et al., 2019)

Penelitian ketiga yang berjudul “*Social Movements on Liberalization Free Marijuana of Thai's*” karya Suriyasai Katasila. Dalam tulisan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana tanamana ganja telah dggunakan sejak zaman Masyarakat Thailand tradisional, dimana belum ada peraturan mengenai narkotika jenis ganja, hal tersebut ditandai dengan banyak sejarah yang menuliskan atau memberikan gambaran masyarakat tradisional Thailand dahulu menggunakan tanaman ganja sebagai konsumsi obat dan bahan makanan. Meskipun perubahan mengenai kebijakan narkotika pada akhirnya berubah menjadi ilegal, namun hal tersebut kemudian memunculkan beragam respon akativisme dari berabgai organisasi masyarakat sipil hingga pada akhirnya muncul penelitian dari Universitas Rangsit yang menyatakan bahwa zat ganja didukung untuk menghambat kanker. Gerakan sosial kian terus mendukung pemerintah untuk dapat melonggarkan kebijakan mengenai penggunaan ganja di Thailand khususnya pada bidang medis, pemanfaatan, budidaya, serta peraturan mengenai konsumsi dan larangan narkotika. (Katasila, 2022)

Selanjutnya penelitian keempat dengan judul “*Political Economy of Cannabis in Thailand*” oleh Mano Laohavanich, dalam penelitian ini dijelaskan mengenai perubahan kebijakan narkoba oleh kementerian Kesehatan Masyarakat di Thailand mengikuti model california yang mengatur masyarakat boleh menanam ganja dengan jumlah tertentu didalam rumahnya. Tujuan dari jurnal ini adalah melihat penerapan, hambatan serta solusi yang ditawarkan oleh Menteri Kesehatan Masyarakat tersebut dalam menerapkan kebijakannya, dalam penulisannya penulis memberikan penejlasan bahwa ganja meupakan tanaman farmasi yang mduah untuk ditanam dan kebijakan regulasinya adalah mengikuti tren-tren negara barat yang juga banyak meregulasi tanaman tersebut, walaupun sudah memiliki deregulasi yang lebih longgar, penggunaan ganja tidak sera merta bebas dilakukan didepan umum atau bebas, dalam penjelasannya ganja memang harus tetap dilarang ntuk tujuan rekreasi, namun dengan adanya pelanggaran konsumsi masyarakat hal ini memberikan keuntungan bagi akademisi dan pekerja medis dan juga pemerintah Thailand untuk dapat mengembangkan ganja medis yang juga menghasilkan keuntungan perekonomian. Masih dalam sisi ekonomi, perkembangan dan regulasi mengenai budidaya ganja untuk medis yang baik juga akan mendorong untuk datangnya dukungan finansial dari para investor dunia kesehatan.(Laohavanich, 2022)

Penelitian terahir berjudul “*Growing Ganja Permission: a Real Gate Way for Thailand’s Promosing Industrial Crop*”, oleh Sarana Rose Sommamo, Tibet Tangpao, Tanachai Pankasemsuk. Dalam penelitian ini berisikan tentang fokus kepada Undang-Undang Narkoba Thailand B.E 2563 yang dimana pemerintah menginzinkan perusahaan untuk memproduksi ganja untuk tujuan terapeutik dan melakukan penelitian dan pengemban yang bermanfaat dalam sains dan pertanian, namun mengenai kepemilikan, distribusi dan penggunaan ganja masih dianggap sesuatu yang salah di Thailand, dalam artikel ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peraturan izin mengenai menanam ganja dan keuntungan legalisasi ganja medis bagi petani berdasarkan peraturan tahun 2019. Penulis memberikan gambaran bahwa adanay kerumitan untuk pihak swasta dalam mengurus perizinan terkait ganja pada awal masa peralihan legalisasi, sehingga dinilai hanya mengintungkan beberapa pihak yang memiliki koneksi dengan pemerintah sehingga dinilai belum menguntungkan petttani skala kecil dan hanya menguntungkan pemerintah. (Sommano et al., 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah “**Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan legalisasi ganja di Thailand?**”

B. Teori/Konsep

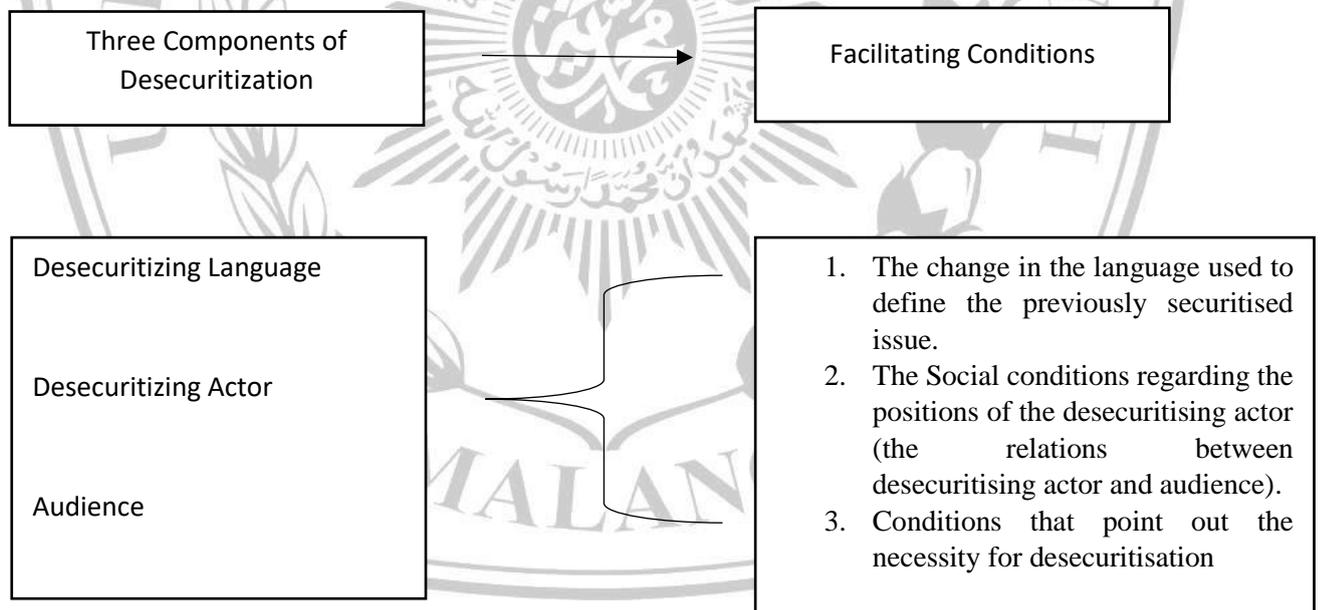
Desekuritisasi

Teori desekuritisasi adalah teori yang diperkenalkan oleh *Copenhagen School* dengan tujuan dalam mempeluas analisis permasalahan keamanan setelah adanya kompleksitas keamanan yang telah dijelaskan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Teori desekuritisasi sejatinya adalah teori anti-thesis dari teori sekuritisasi untuk menganalisa dinamika keamanan nasional negara. Menurut Coskun, desekuritisasi dipahami sebagai menghilangnya suatu isu keamanan (Coskun, 2009). Selain itu Waever telah menjelaskan dalam tulisannya bahwa desekuritisasi sebagai teori dapat dijelaskan sebagai perubahan sikap dalam menghadapi suatu masalah dari ranah politik keamanan menjadi dalam ranah politik normal (Waever, 1995). Penjelasan lainnya adalah jika sebelumnya suatu masalah dihadapi dengan penggunaan jalan kekerasan dan mengalami legitimasi dalam menghadapi isu ancaman, desekuritisasi berusaha menjelaskan secara perlahan untuk menghadapi sebuah isu adalah dengan tidak lagi menggunakan kekerasan sebagai opsi yang sah dan memiliki tujuan akhir untuk tidak melihat sebuah isu dalam bahasan keamanan. Buzan dan Waever menjelaskan disini desekuritisasi sebagai *“A process in which a political community downgrades or ceases to treat something as an existential threat to a valued referent object, and reduces or stops calling for exceptional measures to deal with the threat.”* (Barry Buzan, 2004 dalam Ramadhan, 2021 a).

Dalam penjelasan desekuritisasi agar dapat berjalan, *Copenhagen School* menekankan kepada tiga opsi kepada aktor pembuat kebijakan. Pertama, jika sejak pertama kali memang tidak membicarakan isu dalam bahasan keamanan. Kedua, jika isu sudah disekuritisasi, cobalah untuk tidak membuat dilema keamanan dan “lingkar setan”. Ketiga, menggerakkan kembali isu keamanan menjadi politik normal (Barry Buzan, 2004 dalam Ramadhan, 2021 b). Dalam studi kasus penelitian ini pembahasan mengenai narkoba telah menjadi perbincangan dalam bahasan keamanan dan juga telah banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand. Jika melihat ketiga opsi tersebut, opsi pertama dan kedua tidak dapat digunakan, karena Thailand sebelumnya telah menjadikan zat narkoba ganja dalam pembahasan keamanan. Satu-satunya opsi yang tersisa adalah Thailand kemudian melakukan perubahan regulasi dalam menghadapi permasalahan narkotikanya dengan mengubah pandangannya, sehingga zat narkoba ganja bukan lagi menjadi pembahasan isu keamanan, melainkan isu ranah kebijakan pemerintahan. Opsi tersebutlah yang menjadi pilihan aktor desekuritisasi membuat kebijakan legalisasi ganja dalam melakukan upaya men-desekuritisasi terhadap permasalahan narkoba khususnya ganja di Thailand.

Sebagai penjelasan, dalam menganalisa desekuritisasi, *Copenhagen School* menerangkan bahwa proses analisis harus dengan memahami dinamika keamanan negara itu bekerja. Buzan menerangkan “ *Our approach link itself more closely to existing actors, tries to understand their modus operandi, ... our philosophical position is in some sense more radically constructivist in holding security to always be a political construction and not something the analyst can describe as it ‘really’ is*” (Buzan et al., 1998). Dalam tulisannya, Buzan menerangkan bahwa penganalisisan mengenai modus *operandi* yang dimiliki oleh aktor perlu dilakukan agar mengetahui bagaimana aktor mengatur keamanan negaranya. Untuk mendapatkan peta yang pas di dalam desekuritisasi, Bezer Coskun mencoba memberikan beberapa elemen dari sebuah sekuritisasi membutuhkan perhatian penuh kepada komponen sekuritisasi dan kondisi yang memfasilitasi untuk melakukan desekuritisasi.

Walaupun *Copenhagen School* tidak menjelaskan secara rinci elemen dalam analisis desekuritisasi, Bezer Coskun mencoba memberikan bagan dari analisis desekuritisasi dengan menyimpulkan pengamatannya terhadap analisis keamanan dalam pendekatan tersebut. Coskun memberikan gambaran:



Sumber: Bezer Coskun (Coskun, 2009)

Didalam kondisi yang memfasilitasi sebuah desekuritisasi, terdapat tiga komponen dari sebuah desekuritisasi, yaitu desekuritisasi *language*, desekuritisasi *actors*, dan *audience*. Ketiga komponen ini merupakan hal pokok yang terdapat dalam proses desekuritisasi (Maryam Jamilah

dalam Ramadhan, 2021). Tiga komponen tersebut diatas tidak bisa dipisahkan antara satu komponen dengan yang lainnya, karena tiga komponen tersebut saling kuat mempengaruhi. Pengaruh yang ditimbulkan oleh komponen tersebut membentuk proses desekuritisasi sehingga dapat terjadi. Dalam mengetahui keberhasilan dari proses terjadinya desekuritisasi, terdapat tiga *facilitating conditions* untuk dilakukannya desekuritisasi.

Dalam melakukan sekuritisasi, Waever menegaskan kenapa keamanan bukanlah kondisi objektif melainkan tutur kata yang diucapkan. Waever mendefinisikan keamanan sebagai *speech act* “Security is not of interest as a sign that refers to something more real; the utterance itself is the act... By uttering ‘security’, a state representative moves a particular development into a specific area, and thereby claims a special right to use whatever means are necessary to block it” (Waever, 1995). Dari penjelasan Waever diatas, *Speech act* dilakukan oleh aktor sekuritisasi untuk menggambarkan keamanan mereka merupakan komponen penting untuk melakukan sekuritisasi. Tetapi dalam desekuritisasi, *Speech act* yang dilakukan oleh para aktor sekuritisasi tidak lagi menggunakan bahasa yang menegaskan pembahasan keamanan terhadap suatu fenomena, tetapi sebaliknya, yaitu menggunakan desekuritisasi *language*.

Andrea Oelsner dalam penelitiannya yang menggunakan desekuritisasi dalam kasus perdamaian kawasan di Amerika Latin, aktor yang krusial dalam proses desekuritisasi biasanya datang dari *policy-makers* maupun elit politik, ekonomi, dan sosial di suatu negara (Ramadhan, 2021). Aktor desekuritisasi berupaya untuk meyakinkan publiknya (*audience*) dengan bahasa desekuritisasi mereka. Aktor desekuritisasi juga bisa datang dari pihak yang sebelumnya melakukan sekuritisasi isu dan kemudian memiliki perubahan persepsi terhadap isu tersebut.

Menurut Oelsner, sebuah isu dapat melewati bahasa sekuritisasi lewat dua cara, Pertama karena isu tersebut kehilangan citra ancamannya karena persepsi aktor dan *audience* yang berubah positif kepada isu ancaman tersebut. Kedua dikarenakan aktor maupun *audience* telah mendapatkan perubahan kualitatif dalam hubungan mereka dan sekuritisasi ancaman. Dalam penjelasan tersebut, jika diperhatikan dengan penulisan ini mengenai perubahan sikap khususnya ganja yang saat ini bersifat legal di masyarakat, para aktor khususnya pemerintah selaku pemangku kebijakan telah menggunakan bahasa desekuritisasi dalam mencapai kebijakan tersebut kepada *audience*. Khususnya aktor desekuritisasi dalam tulisan ini adalah Anutin Charnvirakul yang menggunakan bahasa desekuritisasi yang disampaikan kepada masyarakatnya dalam menyikapi permasalahan narkoba khususnya ganja. Selanjutnya untuk melihat bagaimana desekuritisasi dapat dijelaskan maka di butuhkan variabel *facilitating conditions* dari teori desekuritisasi.

Dalam penjelasan pada bab yang sama, *Copenhagen School* menerangkan bahwa desekuritisasi dilahirkan dari desekuritisasi *language* oleh aktor yang mengklaim berbicara tentang dan meminta hak untuk bertindak atas namanya. Sesuai dengan posisi desekuritisasi *language* sebagai salah satu dasar komponen desekuritisasi yang secara definisi merupakan proses komunikasi intersubjektif, setidaknya ada dua sisi yang terlibat, yaitu aktor desekuritisasi dan *audience*. Dalam menyempurnakan sebuah upaya desekuritisasi, Coskun menerangkan faktor yang dapat memfasilitasi desekuritisasi. Faktor tersebut adalah penilaian yang dilakukan setelah mengamati kondisi sukses atau tidaknya sebuah sekuritisasi dalam teori sekuritisasi, dan memiliki sedikit perubahan sesuai dengan komponen yang berada pada proses desekuritisasi. Coskun menerangkan yang memfasilitasi desekuritisasi merujuk kepada:

- a. Perubahan bahasa untuk mendefinisikan isu sekuritisasi sebelumnya.

Perubahan penggunaan bahasa yang dipakai oleh aktor desekuritisasi didasarkan pada tata bahasa dan konstruksi cerita yang diutarakan oleh aktor tersebut. Aktor desekuritisasi akan mengeluarkan pernyataan yang mengisyaratkan perubahan dari yang awalnya isu tersebut disekuritisasi, lalu didesekuritisasi kembali. Hal ini didasari oleh analisis Olesner yang desekuritisasi *language* berhubungan dengan perubahan strategi yang dibahasakan aktor desekuritisasi.

- b. Hubungan antara aktor desekuritisasi dan *audience*

Semakin berpengaruhnya wewenang yang dimiliki oleh aktor desekuritisasi dalam pemerintahan dan bagaimana hubungan yang ia miliki dengan *audience* dapat menjadi daya pendorong keberhasilan sebuah desekuritisasi. Peneliti lainnya, Thiesry Balzacq (Balzacq, 2005) menerangkan bahwa aktor desekuritisasi dapat mendapatkan dua bentuk dukungan oleh para *audience* berupa formal dan moral. Harmoni bentuk dukungan moral dari masyarakat dalam bentuk opini publik, dan secara formal aktor desekuritisasi memerlukan dukungan untuk melakukan tindakan pencegahan ancaman segala cara secara legal. Aktor desekuritisasi berusaha mencari dukungan dari *audiencenya* lewat agen politik agar membentuk opini publik dan bantuan formal yang sesuai dengan bahasa desekuritisasi yang dilakukan oleh aktor desekuritisasi.

- c. Kondisi yang membutuhkan desekuritisasi

Olesner menerangkan ada dua fase dalam proses desekuritisasi; Pertama, stabilisasi perdamaian dan langkah pertama menuju desekuritisasi domestik. Kedua, melibatkan konsolidasi perdamaian untuk memperluas desekuritisasi yang terus tumbuh. Dengan tiga variabel *facilitating conditions* yang telah dijelaskan, peneliti mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya desekuritisasi terhadap perubahan kebijakan narkoba melalui

legalisasi ganja di Thailand.

C. Metodologi

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode jenis Kualitatif Deskriptif dimana penulis menggunakan aspek penulisan sebagai bentuk dalam memberikan gambaran dan penjelasan terhadap penelitian ini. Dalam Dunia Hubungan Internasional metode ini lebih banyak digunakan karena lebih mudah dalam menjeaskan fenomena yang ada dalam dunia Hubungan Internasional.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan langkah awal penelitian dengan pengumpulan data (*Library Research*), melihat dan memahami bacaan, kemudian mencoba memberikan gambaran dan kesimpulan, sehingga bacaan dan penilitian lainnya menjadi sumber yang sekunder dalam peneilitan ini yang kemudian setelahnya dikumpulkan menjadi sebuah variabel sehingga menjadi data kualitatif.

Dalam melakukan teknis analisa data, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Kemudian data yang diperoleh, diolah dan dianalisa melalui interpretasi dari dokumen yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif – kualitatif dengan menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan terhadap data yang ada

D. Hasil dan Pembahasan

Narkotika sebagai bahasan keamanan bagi Thailand

Pada tahun 1970-1980-an Thailand menjadi salah satu negara eksportir ganja ilegal terbesar di dunia, kemudian setelah terbentuknya Undang-undang mengenai Narkotika Thailand pada tahun 1979 yang mengatur larangan produksi, jual-beli, dan kepemilikan ganja, mendapatkan keuntungan, para pengguna narkotika kemudian beralih kepada methamphetamine atau 'yaba', penggunaan methamphetamine yang tidak terkendali itu menjadikan membludaknya kasus penyalagunaan narkoba di Thailand. Undang-undang narkotika B.E 2522 tahun 1979 memberikan penjelasan mengenai 5 kategori/ golongan narkotika, Golongan I merupakan narkotika berbahaya seperti heroin, Golongan II adalah morfin, kokain, kodein, dan obat opium. Golongan III adalah narkotika obat dan mengantung narkotika golongan II, sedangkan golongan IV terdiri dari baha kimia yang digunakan untuk memproduksi narkotika golongan I dan II dan asetat anhidrida dan asetil klorida, dan golongan V adalah yang tidak termasuk dalam golongan I hingga IV.

Pada tahun 2001, Thailand pernah berada pada masa darurat narkoba, hal ini merupakan adanya banyak laporan tentang 3 juta diketahui menggunakan metamfetamin atau pil gila. (Ananda, 2022) Pada saat itu juga Perdana Menteri Thaksin menyatakan terkait kewajiban warga negara untuk memerangi ancaman narkoba. Kemudian pada tahun 2003 kebijakan mengenai narkotika tanpa

toleransi kemudian diganggu.

Kebijakan *war on drugs* pada tahun 2003 adalah kebijakan yang mengedepankan semua kekuatan yang diperlukan dengan menggunakan aparaturnegara serta kebijakan minim toleransi. Pada fase awal kebijakan ini diberlakukan, sekitar 275.000 orang telah memasuki layanan pengobatan dan lebih dari 2.275 pengedar narkoba terbunuh.(Ananda, 2022). Perang terhadap narkoba ini melibatkan aparaturnegara wajib seperti kepolisian serta negara, dalam kasusnya tingkat penggunaan metamfetamin memang menunjukkan penurunan konsumsi sebesar 2,6 persen di tahun 2001 menjadi 0,2 persen pada 2003.

Pada bulan Oktober 2003, Menteri Luar Negeri Thailand menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri AS bahwa terhadid 2.593 kasus pembunuhan yang telah dilakukan sejak bulan february, kemudian pada 15 Desember 2003, Kepolisian kerajaan Thailand juga melaporkan 1.329 pembunuhan terkait narkoba dan lebih dari 70.000 orang yang diduga terlibat dalam jejaring narkoba juga ditangkap.(Cohen, 2004)

Dalam keterangannya, Perdana Menteri Thaksin menjelaskan diperlukan tangan besi dalam menghadapi kasus obat narkotika tersebut. “Untuk melawan obat-obatan terlarang, kita memang harus menggunakan tangan besi, karena obat-obatan terlarang sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Jangan ada belas kasihan, karena menjadi kejam terhadap mereka (pelaku obat-obatan terlarang) tidaklah merupakan hal yang buruk, dan jika ada kematian diantara penyelundup, hal itu sangatlah normal”(Phiongpachit, 2003 dalam Kama et al., 2019).

Dalam perjalannya menuju bersih-bersih narkotika tersebut, memang menunjukkan hasil yang signifikan, namun selain banyaknya korban ternyata kebijakan dari Perdana Menteri Thaksin memiliki dampak kesejahteraan bagi para petani ganja yang kehilangan lahan dan tidak memiliki penghasilan akibat kebijakan tersebut. Pada tahun 2003, tercatat ada 2800 korban dari kebijakan tangan besi narkotika itu, namun hal itu banyak ditentang dikarenakan banyak sekali korban yang telah jatuh ternyata bukan pengguna ganja ataupun pengedar ganja.

Perdana Menteri Thaksin juga kemudian mendeklarasikan keberhasilannya terhadap perang terhadap narkoba pada Mei 2003, namun pada Febuari 2004, Departemen Luar Negeri AS melaporkan terhadap kebijakan tangan besi Thailand itu sebagai catatan pelanggaran HAM.Catatan itu diperoleh dari banyaknya jumlah korban yang terbunuh tanpa adanya proses tanpa hukum dan penangkapan sewenang-wenangnya/ Hal ni menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap kematian terhadid tersangka kriminal.(Cohen, 2004)

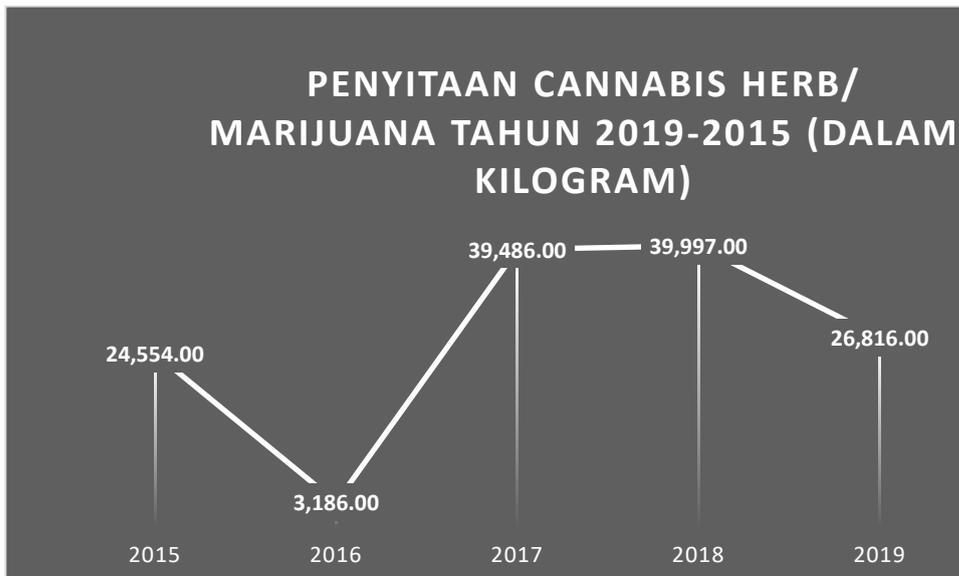
Selain menggunakan kebijakan dalam negerinya, Thailand juga terlibat aktif dalam organisasi internasional maupun regional, Thailand sebagai negara yang berada dikawasan ASEAN tentu juga terlibat aktif dalam kongres Internasional ASEAN bebas narkoba, pada bulan Oktober 2000

negara ASEAN berkumpul di Bangkok untuk bekerja sama dengan Kantor PBB Drugs Control and Crime Prevention dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba 2015. Dalam kongres tersebut ASEAN berfokus kepada empat pilar/ tujuan utama: Proaktif mengadvokasi kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan respons sosial; Membangun konsensus dan berbagai praktik terbaik tentang pengurangan permintaan narkoba; Memperkuat supremasi hukum dengan meningkatkan jejaring tindakan kontrol dan meningkatkan kerja sama penegakan hukum serta tinjauan legislatif; dan Meniadakan peredaran obat-obatan terlarang dengan menggenjot program pembangunan alternatif dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tanaman yang dilarang. (Ananda, 2022).

Pada tahun 2016, Menteri Kehakiman Thailand, Paiboon Kumchaya menyatakan bahwa kebijakan mengenai perang terhadap narkoba gagal sehingga diperlukan metode penanganan lain terhadap penyalahgunaan narkoba, hal tersebut disampaikan oleh Menteri tersebut dalam Konferensi PBB tentang narkotika di New York City. “Tiga puluh tahun yang lalu, kita berbicara tentang Perang Melawan Narkoba. Kami menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh ada narkoba yang tersisa di bumi. Tetapi ketika saya mengikuti pertemuan ini pada bulan April, sudah tidak seperti itu lagi. Sederhananya: ini tentang bagaimana kita hidup bahagia dengan narkoba, dan bagaimana semua orang bisa memahaminya, dan mendapatkan manfaat darinya” (Khaosodenglish, 2016) Dasar Kumchaya mengatakan bahwa kegagalan tersebut adalah sejak di terbitkannya kebijakan berperang terhadap narkotika, tidak memberikan hasil yang memuaskan, alih alih berhasil mengusir bandar narkoba dan mengurangi pecandu, malah kian banyak warga Thailand yang terjerat narkoba. Selain itu juga, permasalahan narkotika bukan hanya terkait penyebarannya saja, melainkan ada permasalahan terhadap perekonomian negara.

Selain itu juga adanya Paiboon juga menyerukan untuk mengkaji ulang terhadap undang-undang narkotika dimana para pecandu diberikan langkah konkret dalam masalah rehabilitasi dan pengobatan ketimbang memilih untuk memberikan hukuman “Kami sedang mengkajinya. Ini masuk ke dalam overhaul undang-undang narkoba di Thailand yang ininya memberi diskresi kepada pecandu. Mereka harus diobati dan direhabilitasi ketimbang dihukum,”

Dalam catatan United Nation Office on Drugs Crime (UNODC) setelah adanya kebijakan mengenai *war on drugs* dan juga keterlibatan Thailand lainnya, permasalahan mengenai narkotika tidak juga menunjukkan penurunan, hal ini dapat dilihat dari data UNODC terhadap penyitaan atau pengamanan ganja yang telah beredar di Thailand sejak tahun 2015 hingga 2019



Sumber: Reported Data Seizures, United Nations On Drugs and Crime ([dp-drug-seizures | dataUNODC](https://data.unodc.org/))

Dari data ini terlihat dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyitaan ganja dari *Drugs Trafficking* yang berhasil didata oleh UNODC. Menunjukkan walaupun setelah adanya kebijakan tangan besi dan adanya kerjasama internasional lainnya, peningkatan pasar gelap ataupun penyebaran salah satu narkotika yaitu ganja masih menunjukkan status yang menjadi masalah, hal ditandai dengan naik-turunnya jumlah kasus penyitaan jenis narkotika tersebut, bahkan peningkatan paling besar ada pada 2018 yaitu 39.997.00 Kilogram ganja.

Dalam catatan lainnya, hampir 80 persen dari total narapidana Thailand merupakan narapidana pelanggaran narkoba, angka tersebut adalah angka kumulatif dari tahun ketahun. Selain menimbulkan permasalahan mengenai penuhnya narapidana, Thailand juga dihadapi dengan adanya peningkatan biaya anggaran dalam menangani masalah penyalagunaan narkotika. Tercatat sejak tahun 2002 hingga 2016 anggaran mengenai permasalahan narkotika berada pada 10.695.243.399 bath atau sejumlah US \$ 339.156.268,69. Jika dibandingkan dengan seluruh pendanaan dan juga terkait dengan jumlah penangkapan yang terjadi maka apakah sebenarnya upaya Pemerintah Thailand dalam menanggapi narkotika ini dinilai sangat nihil atau menjadi tidak memiliki arti? Dalam anggaran tersebut bisa saja kemudian meningkat mengikuti jumlah narapidana atau kasus narkotika yang terus bertambah, selain itu pemerintah juga memikirkan perawatan narapidana dan juga anggaran aparaturnya dalam memerangi penyalagunaan narkotika di Thailand, sedangkan hampir 80 persen penjara di Thailand dipenuhi oleh narapidana narkotika. (Kama et al., 2019)

Transformasi kebijakan narkotika, legalisasi ganja di Thailand

Kebijakan legalisasi ganja dimulai pada tahun 2015-2016, dimana muncul kampanye-kampanye mengenai perubahan arah kebijakan atau Undang-undang narkotika B.E 2522 tahun 1979 untuk mencoba menelaah kembali daftar narkotika khususnya ganja. Thailand telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai permasalahan narkoba, salah satunya ganja, Thailand juga menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memberlakukan kebijakan legalitas pada tanaman *cannabis* / mariyuana yang biasa disebut dengan ganja. Bermula pada kampanye yang dilakukan oleh Anuti Charnvirakul untuk dapat merekonstruksi kebijakan ganja. Pada 25 Desember 2018 menjadi awal Parlemen Thailand menyetujui penggunaan ganja dalam bidang medis. Kemudian kebijakan tersebut mengalami perkembangan pada Maret 2019 setelah menangnya partai politik Anutin Charnvtrakul yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, pada tahun tersebut Thailand menaikkan level legalisasi tanaman ganja medis dengan merencanakan pemberian izin kepada semua warga Thailand untuk dapat menanam 6 tanaman ganja dirumah dan kemudian dapat menjual hasil panen kepada pemerintah untuk dijadikan bahan dari ganja medis.(Ananda, 2022).

Pada tahun 2021, Pemerintah Thailand kemudian mempebaharui Undang-Undang mengenai narkotikannya yaitu B.E 2564 tahun 2021, dalam peraturan tersebut lebih jelas dan ketat mengatur keperluan ganja dalam keperluan medis melalui izin produksi dan penjualan. Dalam peraturan ini juga menjelaskan bahwa kepemilikan ganja secara individu dalam jumlah tertentu diperbolehkan namun harus memiliki resep dan sertifikasi lewat pemerintah. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa penanaman ganja industri dan penanaman ganja berlisensi untuk tujuan penelitian dan penyelidikan ilmiah adalah legal atau diperbolehkan. Serta penggunaan pribadi juga diperbolehkan selama memiliki izin dari pihak otoritas. Secara umum perundang-undangan ini membahas tentang pembuatan, impor, ekspor, penjualan, kepemilikan dan penggunaan narkotika di Thailand dilarang, kecuali memiliki perizinan dari pihak yang berwenang.(Pratama, 2023)

Pemerintah kemudian melakukan perubahan kembali pada perundang-undangan narkotika Thailand. Peraturan baru Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand *Notification Re: Specification of Type 5 Narcotics B.E 2565 (2022)* menerangkan bahwa yang masih dalam daftar narkotika kategori 5 adalah ekstra ganja dengan THC diatas 0,2% (Notification Of The Ministry of Public Health, Re: Prescribing the List Of Category 5 Narcotics, B.E 2565 (2022)). Peraturan ini menjadikan tanaman ganja telah resmi menjadi tanaman “herbal terkontrol” yang berada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand. Secara historis masyarakat Thailand telah menggunakan tanaman ganja sebagai bahan budaya rekreasi, tujuan industri baru, serta ramuan obat, ganja di Thailand dipercaya dapat mengobati masalah depresi, stress, rasa sakit, dan

kelelahan. Selain itu ganja juga digunakan sebagai masakan tradisional hingga menjadi bahan tekstil (Aroonsrimorakot et al., 2019), namun semuanya telah berubah semenjak akhirnya Thailand mengeluarkan kebijakan yang menentang dan memasukan ganja sebagai salah satu zat narkotika. Secara umum, pembuatan, impor, ekspor, penjualan, kepemilikan, serta penggunaan narkotika di Thailand adalah dilarang, kecuali sang pealku memiliki perizinan. Semua perizinana dapat dilakukan permohonan kepada Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan atau orang yang ditunjuk oleh yang terakhir berdasarkan aturan, prosedur, dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan menteri.

Perubahan paradigma global terhadap ganja terjadi dalam beberapa tahun terakhir, ganja dinilai sebagai satu-satunya kandidat narkotika yang berpotensi disahkan. Secara global ada tiga kategori pelegalan ganja, rekreasi, kebutuhan medis, dan budaya (Tarigan & Collins, 2019). Banyak negara kemudian telah merombak kebijakan dan pandangannya mengenai narkotika khususnya ganja, Negara Jerman dan Argentina telah mengatur tentang legalnya kepemilikan ganja terhadap warganya, Australia, Belgia, Selandia Baru, Spanyol, dan Sri Lanka menggunakan ganja sebagai bahan medis, serta beberapa negara bagian Amerika Serikat yang melegalkan penggunaan ganja.

Selain itu Kementerian kesehatan masyarakat juga membuat panduan kepada para wisatawan mengenai ganja di Thailand, hal ini memiliki tujuan dalam memberikan panduan atau penjelasan kepada wisatawan yang datang ke Thailand, pemerintah kemudian menyebutnya sebagai “10 hal yang perlu diketahui turis tentang Ganja di Thailand”; Pertama, mengangkut benih atau bagian dari tanaman ganja ke atau dari Thailand adalah ilegal; Kedua, budidaya ganja adalah legal jika para petani mendaftarkan dirinya pada aplikasi Plook Ganja yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand atau melalui situs web pemerintah yang relevan; Ketiga, menggunakan kuncup bunga ganja untuk penelitian, ekspor, peneualan atau pemrosesan untuk tujuan komersial adalah memerlukan izin resmi; Keempat, ganja tidak boleh dikonsumsi oleh orang dibawah usia 20 tahun, ibu hamil, atau menyusui kecuali dibawah pengawasan tenaga kesehatan; Kelima, kepemilikan ekstrak yang mengandung lebih dari 0,2 persen THC dan THC sintetis memerlukan izin; Keenam, ganja dalam makanan hanya tersedia di restoran resmi; Ketujuh, produk kesehatan ganja yang disetujui dapat diakses melalui saluran tertentu; Kedelapan, merokok ganja di tempat umum, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan adalah ilegal; Kesembilan, hindari mengemudi setelah mengonsumsi makanan atau produk yang mengandung ganja; Kesepuluh, bagi yang memiliki reaksi buruk terhadap ganja disarankan untuk segera menemui dokter untuk mendapatkan pengobatan (Ananda, 2022).

Aturan mengenai legalisasi ganja menjadi Thailand sebagai negara dengan pendekatan paling liberal di daerah kawasan ASEAN, dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat dapat menikmati ganja tanpa harus berurusan dengan hukum selagi masih berada dalam peraturan yang berlaku. Namun ada beberapa alasan mengapa pada akhirnya Anutin Charnvakul menjadikan kebijakan legalisasi ganja sebagai kebijakan heroiknya:

1. Politik: Anutin Charnvakul menggunakan kampanye mengenai ganja sebagai langkah ia mendapatkan suara dalam pemilu 2019 Thailand, hal ini terbilang sukses dengan kemenangan dari partai Anutin dalam pemilu dan menjadikan Anutin sebagai Menteri Kesehatan Masyarakat sehingga dapat memberlakukan kebijakan legalisasi ganja.
2. Bisnis: Dalam perkiraannya Dalam hasil analisa *Grand View Research* dalam laporan analisis ukuran, pangsa dan tren pasar ganja legal Thailand dalam agenda 2020-2030 bahwa nilai ukuran pasar ganja pada tahun 2022 senilai US \$242.8 juta, sedangkan dalam perkiraan pendapatan pada tahun 2030 senilai US \$ 9,6 miliar serta adanya pertumbuhan pasar sebesar 58,4 % dari tahun 2022 hingga 2030. (*Grand View Research, 2023*) Tentu hal ini menjadi angin segar bagi Thailand dalam membuka keran kesempatan pertumbuhan ekonominya.
3. Alasan Peninjauan Ulang: Dalam kebijakan legalisasi ganja adanya tujuan untuk dapat meninjau ulang pendekatan keras yang dahulu telah dilaksanakan dalam kebijakan narkotika. Thailand sendiri yang sebelumnya menggunakan pendekatan keras terhadap pengguna narkotika menghadapi permasalahan pembudakan narapidananya yang akhirnya melampaui batas, bahkan disebutkan tiga-perempat narapidana di Thailand adalah narapidana kasus narkotika dan sebagian besarnya masih berada dibawah umur (Lutfiyani, Dini et al., 2023)

Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan ganja, langkah Desekuritisasi

Barry Buzan sebagai salah satu akademisi yang berfokus kepada isu keamanan, Buzan membagi keamanan dalam beberapa dimensi, politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berkaitan dengan keempat dimensi keamanan tersebut, masalah peredaran obat-obat terlarang sebagai bagian dari kejahatan transnasional dilihat sebagai isu keamanan yang menurut Alan Dupont didasarkan atas empat proposisi. Pertama, kegiatan-kegiatan kejahatan transnasional dapat menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas dari kegiatan-kegiatan tersebut mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu negara. Kedua adalah menurunnya legitimasi dan otorita negara tersebut akan menyebabkan

maraknya tindak korupsi yang merupakan bagian dari strategi aktor-aktor kejahatan transnasional untuk mempertahankan bisnis ilegal mereka. Hal ini pada gilirannya menimbulkan ancaman dibidang ekonomi. Ketiga meningkatnya kekuatan koersif dari sindikat kejahatan tersebut, pada tingkat internasional dapat juga mengancam institusi yang berperan menjaga tatanan global. Keempat, kejahatan transnasional tersebut juga dapat menghadirkan ancaman yang bersifat militer brutama jika berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari berbagai kelompok pemberontakan internal di dalam negara.(Dupont, op.cit., hlm 436 dalam Tobing, 2002).

Selanjutnya, *Copenhagen School* juga memperkenalkan teori desekuritisasi, teori ini memiliki tujuan dalam mempeluas analisis permasalahan keamanan setelah adanya kompleksitas keamanan yang telah dijelaskan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Teori desekuritisasi sejatinya adalah teori anti- thesis dari teori sekuritisasi untuk menganalisa dinamika keamanan nasional negara. Menurut Coskun, desekuritisasi dipahami sebagai menghilangkan suatu isu keamanan(Coskun, 2009). Selain itu Waever telah menjelaskan dalam tulisannya bahwa desekuritisasi sebagai teori dapat dijelaskan sebagai perubahan sikap dalam menghadapi suatu masalah dari ranah politik keamanan menjadi dalam ranah politik normal(Waever, 1995).

Didalam kondisi yang memfasilitasi sebuah desekuritisasi, terdapat tiga komponen dari sebuah desekuritisasi, yaitu desekuritisasi *language*, desekuritisasi *actors*, dan *audience*. Ketiga komponen ini merupakan hal pokok yang terdapat dalam proses desekuritisasi(Maryam Jamilah dalam Ramadhan, 2021). Tiga komponen tersebut diatas tidak bisa dipisahkan antara satu komponen dengan yang lainnya, karena tiga komponen tersebut saling kuat mempengaruhi. Pengaruh yang ditimbulkan oleh komponen tersebut membentuk proses desekuritisasi sehingga dapat terjadi. Dalam mengetahui keberhasilan dari proses terjadinya desekuritisasi, terdapat tiga *facilitating conditions* untuk dilakukannya desekuritisasi.

Dalam bab ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan legalisasi ganja di Thailand, penulis mencoba memberikan gambaran dengan beberapa variable yang digunakan dalam proses desekuritisasi, antara lain adalah aktor desekuritisasi, desekuritisasi *language*, dan *audience*. Namun sebelum masuk dalam analisis tersebut, penulis mencoba masuk kedalam opsi pembahasan mengenai bagaimana para pembuat kebijakan dapat menjalankan desekuritisasi. *Copenhagen School* menekankan kepada tiga opsi kepada aktor pembuat kebijakan. Pertama, jika sejak pertama kali memang tidak membicarakan isu dalam bahasan keamanan. Kedua, jika isu sudah disekuritisasi, cobalah untuk tidak membuat dilema keamanan dan “lingkar setan”. Ketiga, menggerakkan kembali isu keamanan menjadi politik normal(Barry Buzan, 2004 dalam Ramadhan, 2021) mengenai permasalahan

narkotika, pemerintah telah menyatakan adanya ancaman atau bahasan keamanan terhadap narkotika yang beredar di Thailand secara ilegal, hal tersebut kemudian menciptakan pasar gelap yang kemudian memunculkan permasalahan sosial khususnya di daerah perbatasan. Permasalahan-permasalahan narkotika tersebut kemudian direspon oleh Perdana Menteri Thaksin melalui kebijakan terhadap kebijakan *War on Drugs* memberikan gambaran bahwa terdapat masalah yang serius terhadap kejahatan narkotika di Thailand, dalam hal ini Perdana menteri Thaksin berusaha memberikan gambaran bahwa adanya pelanggaran yang terjadi dan diperlukannya kebijakan tangan besi dalam menghadapinya. Namun kebijakan non-toleran tersebut ternyata menimbulkan masalah atau ancaman lainnya, salah satunya adalah ancaman dalam dimensi sosial dimana pada akhirnya banyak sekali warga Thailand yang harus merasakan hukuman penjara atau bahkan pembunuhan akibat kebijakan tangan besi tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan pembledakan narapidana dan juga masalah ekonomi negara untuk menyelesaikan masalah narkotika dan juga peredaran pasar gelap.

Selain itu Menteri Paiboon Kumchaya menyatakan bahwa kebijakan mengenai perang terhadap narkoba gagal sehingga diperlukan metode penanganan lain terhadap penyalahgunaan narkoba, hal tersebut disampaikan oleh Menteri tersebut dalam Konferensi PBB tentang narkotika di New York City dan menyerukan adanya pendekatan baru mengenai narkotika tersebut. Kemudian di tahun 2019 adanya wacana yang dilakukan oleh Anutin Charnvirakul dalam kampanyenya kemudian menyuarakan legalisasi ganja sebagai langkah politik dan juga sebagai langkah dalam memulai pendekatan baru.

Masuk kedalam komponen penting mengenai desekuritisasi, Penulis menggunakan Anutin Charnvirakul sebagai pemerintah atau pembuat kebijakan sebagai **aktor desekuritisasi**. Anutin Charnvirakul sebelumnya sebagai aktor yang melakukan desekuritisasi dan juga menyampaikan **bahasa desekuritisasinya**, dengan menyampaikan retorika kepada **audience** dalam hal ini masyarakat Thailand bahwa adanya ancaman dalam permasalahan narkotika dan memerlukan pendekatan baru, hal ini diutarakan oleh Anutin dalam kampanyenya di 2019 mengenai regulasi narkotika tersebut, setidaknya adanya 3 tujuan yang dijelaskan Anutin dalam regulasi tersebut,

1. Politik: Anutin Charnvakul menggunakan kampanye mengenai ganja sebagai langkah ia mendapatkan suara dalam pemilu 2019 Thailand, hal ini terbilang sukses dengan kemenangan dari partai Anutin dalam pemilu dan menjadikan Anutin sebagai Menteri Kesehatan Masyarakat sehingga dapat memberlakukan kebijakan legalisasi ganja.

2. **Bisnis:** Dalam perkiraannya Dalam hasil analisa *Grand View Research* dalam laporan analisis ukuran, pangsa dan tren pasar ganja legal Thailand dalam agenda 2020-2030 bahwa nilai ukuran pasar ganja pada tahun 2022 senilai US \$242.8 juta, sedangkan dalam perkiraan pendapatan pada tahun 2030 senilai US \$ 9,6 miliar serta adanya pertumbuhan pasar sebesar 58,4 % dari tahun 2022 hingga 2030. (*Grand View Research, 2023*) Tentu hal ini menjadi angin segar bagi Thailand dalam membuka keran kesempatan pertumbuhan ekonominya.
3. **Alasan Peninjauan Ulang:** Dalam kebijakan legalisasi ganja adanya tujuan untuk dapat meninjau ulang pendekatan keras yang dahulu telah dilaksanakan dalam kebijakan narkotika. Thailand sendiri yang sebelumnya menggunakan pendekatan keras terhadap pengguna narkotika menghadapi permasalahan pembudakan narapidananya yang akhirnya melampaui batas, bahkan disebutkan tiga-perempat narapidana di Thailand adalah narapidana kasus narkotika dan sebagian besarnya masih berada dibawah umur (Lutfiyani, Dini et al., 2023)

Penjelasan tersebut diatas adalah penjelasan yang penulis coba tuliskan sebagai memenuhi variable dari komponen desekritisasi, sejatinya 3 komponen antara lain aktor, bahasa desekritisasi, dan audiensi yang menjadi pokok pembahasan telah penulis tuliskan, kemudian selanjutnya adalah bagaimana desekritisasi ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan variabel *facilitating conditions* dari teori desekritisasi.

Pada bab sebelumnya, penulis telah memberikan gambaran terhadap *facilitating conditions* yang dijelaskan oleh Bezer Coskun, dalam penjelasannya Bezer menerangkan ada 3 variable, antara lain; perubahan bahasa keamanan, kedekatan hubungan antara aktor desekritisasi dengan audiens, dan kondisi yang membutuhkan desekritisasi.

Pada variable pertama, **Perubahan bahasa untuk mendefinisikan isu sekritisasi sebelumnya.** Menurut Bezer perubahan penggunaan bahasa yang dipakai oleh aktor desekritisasi didasarkan pada tata bahasa dan konstruksi retorika yang diutarakan oleh aktor tersebut. Aktor desekritisasi akan mengeluarkan pernyataan yang mengisyaratkan perubahan dari yang awalnya isu tersebut disekritisasi, lalu didesekritisasi kembali. Hal ini didasari oleh analisis Olesner yang desekritisasi *language* berhubungan dengan perubahan strategi yang dibahasakan aktor desekritisasi.

Pada penjelasan di atas, penulis telah menerangkan bahwa Anuti Charnvirakul selaku aktor desekritisasi tunggal dalam penelitian ini telah menggunakan retorikannya dalam menjawab permasalahan narkotika khususnya di Thailand, sebelum menjadi pejabat, Anutin telah lebih

dahulu menggunakan kemampuannya untuk dapat meyakinkan para audiensnya dalam hal ini masyarakat untuk dapat memilihnya dalam pemilu 2019 Thailand, hasilnya dalam meyakinkan tersebut, Anutin kemudian menggunakan isu legalisasi ganja sebagai bentuk Desekuritisasi terhadap permasalahan-permasalahan narkoba yang terjadi di Thailand. Tujuan Anutin Charnvirakul telah dijelaskan, salah satunya adalah diperlukannya adanya regulasi baru mengenai narkoba, Anutin mencoba menjelaskan bahwa dalam kebijakan legalisasi ganja adanya tujuan untuk dapat meninjau ulang pendekatan keras yang dahulu telah dilaksanakan dalam kebijakan narkoba. Thailand sendiri yang sebelumnya menggunakan pendekatan keras terhadap pengguna narkoba menghadapi permasalahan pembudakan narapidananya yang akhirnya melampaui batas.

Variable kedua adalah **Hubungan antara aktor desekuritisasi dan audience**. Semakin berpengaruhnya wewenang yang dimiliki oleh aktor desekuritisasi dalam pemerintahan dan bagaimana hubungan yang ia miliki dengan *audience* dapat menjadi daya pendorong keberhasilan sebuah desekuritisasi. Sebelum Anutin menyampaikan tujuannya dalam legalisasi ganja, kebijakan legalisasi ganja dimulai pada tahun 2015-2016, dimana muncul kampanye-kampanye mengenai perubahan arah kebijakan atau Undang-undang narkoba B.E 2522 tahun 1979 untuk mencoba menelaah kembali daftar narkoba khususnya ganja, kemudian Anutin kemudian mencoba memberikan motivasi dan juga harapan kepada para pendukungnya khususnya yang ingin mengambil manfaat terhadap tanaman ganja untuk dapat mendukung dirinya dalam pemilu 2019. Hasilnya memang Anutin Chanrvirakul telah mendapatkan dukungan moral dengan keluarnya Anutin sebagai pemenang dalam pemilu Thailand. Anutin mencoba memberikan gambaran dengan harapan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan serta membudidayakan tanaman ganja. Tentu hal ini menjadi angin segar bagi warga Thailand yang sebelumnya skeptis dan terhalang oleh regulasi ilegal narkoba.

Variable ketiga yaitu **Kondisi yang membutuhkan desekuritisasi**, melalui penjelasan pada bab sebelumnya, peneliti mengutip pernyataan dari Menteri Kehakiman Thailand, Paiboon Kumchaya menyatakan bahwa kebijakan mengenai perang terhadap narkoba gagal sehingga diperlukan metode penanganan lain terhadap penyalahgunaan narkoba, Paiboon juga menyerukan untuk mengkaji ulang terhadap undang-undang narkoba dimana para pecandu diberikan langkah konkret dalam masalah rehabilitasi dan pengobatan ketimbang memilih untuk memberikan hukuman “Kami sedang mengkajinya. Ini masuk ke dalam overhaul undang-undang narkoba di Thailand yang inintinya memberi diskresi kepada pecandu. Mereka harus diobati dan direhabilitasi ketimbang dihukum,”. Kedua pertanyaan tersebut kemudian menjadi motivasi Anutin untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkoba dengan meregulasi ulang pendekatan terhadap narkoba.

Anutin menerangkan bahwa, kebijakan legalisasi ganja adanya tujuan untuk dapat meninjau ulang pendekatan keras yang dahulu telah dilaksanakan dalam kebijakan narkotika. Thailand sendiri yang sebelumnya menggunakan pendekatan keras terhadap pengguna narkotika menghadapi permasalahan pembledakan narapidananya yang akhirnya melampaui batas, bahkan disebutkan tiga-perempat narapidana di Thailand adalah narapidana kasus narkotika dan sebagian besarnya masih berada dibawah umur(Lutfiyani, Dini et al., 2023)

Kembali kepada pernyataan dari Paiboon yang menyatakan adanya kegagalan terhadap perang melawan narkotika juga menjadi alasan Paiboon menyatakan perlunya ada pendekatan baru mengenai permasalahan narkotika. Permasalahan narkotika dengan tingginya angka penggunaan narkotika sejak penggunaan narkotika termasuk dalam kriminal, kemudian angka penggunaan tersebut memunculkan kebijakan non-toleran pada tahun 2003.

Pada bulan Oktober 2003, Menteri Luar Negeri Thailand menyampakan kepada Departemen Luar Negeri AS bahwa terhadi 2.593 kasus pembunuhan yang telah dilakukan sejak bulan februari, kemudian pada 15 Desember 2003, Kepolisian kerajaan Thailand juga melaporkan 1.329 pembunuhan terkait narkoba dan lebih dari 70.000 orang yang diduga terlibat dalam jejaring narkoba juga ditangkap.(Cohen, 2004) selain itu, hampir 80 persen dari total narapidana Thailand merupakan narapidana pelanggaran narkoba, angka tersebut adalah angka kumulatif dari tahun ketahun. Selain menimbulkan permasalahan mengenai penuhnya narapidana, Thailand juga dihadapi dengan adanya peningkatan biaya anggaran dalam menangani masalah penyalagunaan narkotika. Tercatat sejak tahun 2002 hingga 2016 anggaran mengenai permasalahan narkotika berada pada 10.695.243.399 bath atau sejumlah US \$ 339.156.268,69. Jika dibandingkan dengan seluruh pendanaan dan juga terkait dengan jumlah penangkapan yang terjadi maka apakah sebenarnya upaya Pemerintah Thailand dalam menandai narkotika ini dinilai sangat nihil atau menjadi tidak memiliki arti? Dalam anggaran tersebut bisa saja kemudian meningkat mengikuti jumlah narapidana atau kasus narkotika yang terus bertambah, selain itu pemerintah juga memikirkan perawatan narapidana dan juga anggaran aparaturnya dalam memerangi penyalagunaan narkotika d Thailand, sedangkan hampir 80 persen pernjara di Thailand dipenuhi oleh narapidana narkotika.(Kama et al., 2019).

Melalui berbagai macam penjelasan serta adanya argumen yang menjadi penguat penulis dalam penelitian ini, maka dapat penulis berusaha memberikan gambaran bahwa dengan adanya perhatian pemerintah melalui regulasi yang jelas, Pemerintahan Thailand mencoba melakukan pendekatan baru yang bersifat humanis, dimana tidak melibatkan pihak keamanan khususnya militer. Dengan peraturan baru mengenai ganja tentu menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang

memang memiliki ketergantungan atau ingin mendapatkan manfaat dari ganja, Pemerintah Thailand telah mengatur bahwa setiap warganya dapat membeli ganja yang memiliki kandungan kurang dari 0,2% THC di berbagai apotik dan toko-toko herbal atau makanan yang telah mendapatkan izin pemerintah dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand. Selain itu adanya pendekatan baru ini kemudian telah membuka kesempatan baru bagi para petani untuk dapat membudidayakan ganja yang dapat dijual kepada pemerintah. Sedangkan dalam aspek sosial banyak narapidana yang memiliki catatan kecil dalam narkotika kemudian mendapatkan tiket untuk keluar dari tahanan.

Mengenai dengan pertembuhan ekonomi, terdapat juga laporan bahwa semenjak kebijakan narkotika diubah pada tahun 2022, banyak orang yang kemudian mengajukan permohonan kepada departemen terkait untuk mendapatkan keuntungan dari pergeseran kebijakan tersebut. Perizinan tersebut datang dari berbagai kalangan, pengusaha ekspor, penelitian medis, dan ritel. Pada tahun 2022 juga tercatat Kementerian terkait telah mengeluarkan 5000 izin penjualan ganja kepada pihak swasta, dan 4.033 apotik aktif yang telah mendapatkan izin dalam menjual ganja. Selain itu juga Departemen Pertanian pada akhir tahun 2021 dengan keterlibatan pihak swasta, perusahaan masyarakat yang dipimpin oleh petani telah memiliki izin sebanyak 2.793 izin yang disetujui, dan 343 izin budidaya. Dan pada Juni 2022 lebih dari 785.000 orang telah mengajukan izin budidaya ganja pribadi dalam portal resmi pemerintah. (Tanguay, 2024)

Data-data tersebut di atas menjadi argumen penulis untuk menjawab tujuan pembahasan penulis dalam penelitian ini, bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan mengapa regulasi mengenai penggunaan ganja dilakukan di Thailand, contohnya banyak kebijakan yang dahulu telah diberlakukan namun tidak menimbulkan penyelesaian, kemudian munculnya juga permasalahan lainnya hasil dari kebijakan narkotika. Kemudian Anutin Charnvirakul sebagai tokoh yang merubah kebijakan tersebut kemudian melakukan pembahasan mengenai perubahan kebijakan terhadap narkotika khususnya ganja, pandangan barunya kian menjadi langkah anutin untuk tidak lagi membahas ganja dalam pembahasan narkotika dalam ranah keamanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut telah penulis coba uraikan dengan penjelasan dengan menggunakan teori desekritisasi untuk dapat menjelaskan dan menguraikan dengan baik terhadap fenomena legalisasi ganja di Thailand tersebut.

E. Kesimpulan

Sejak awalnya memiliki pandangan yang bersifat skeptis terhadap narkotika Ganja, Thailand pada akhirnya memberlakukan pendekatan baru terhadap ganja, namun sebelum menuju

pendekatan baru, permasalahan mengenai kejahatan narkoba memang telah menjadi konsern pemerintah Thailand untuk dapat diberantas. Namun dari sekian kebijakan pemerintah untuk dapat menekan pasar gelap tersebut, hasilnya tidak terlalu signifikan, bahkan ada beberapa aspek yang dinilai hanya merugikan negara Thailand itu sendiri. Dengan menggunakan perpektif keamanan, melihat bagaimana pasar gelap narkoba dinilai sebagai kejahatan yang bersifat transnasional maka sejalan bahwa Pemerintah Thailand berusaha mengontrol pasar gelap dengan melegalkan ganja, hal ini lah yang kemudian menjadi maksud penulis sebagai langkah desekuritisasi, dimana Thailand mengambil peran yang besar untuk dapat mengontrol peredaran narkoba khususnya ganja.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan legalisasi ganja terhadap kebijakan narkoba Thailand adalah desekuritisasi isu terhadap ganja yang dilakukan oleh Anutin Charnvirakul. Desekuritisasi yang terjadi ini adalah berupa gaya bahasa, tindakan dan sikap bagaimana Anutin membuat kebijakan dan pendekatan baru terhadap keberadaan ganja di Thailand dengan melihat 3 variable dari desekuritisasi. Perubahan bahasa terjadi karena tanaman ganja dilihat sebagai tanaman yang memiliki manfaat baik dari segi perekonomian di masyarakat maupun negara, selanjutnya perubahan ini juga bisa dilihat dari motivasi Anutin dalam meregulasi kebijakan narkoba yang sebelumnya telah dibahas oleh Menteri Paiboon yang menyatakan bahwa masih banyak permasalahan terhadap narkoba walaupun menggunakan pembahasan keamanan.

Paiboon juga mendorong untuk dapat meregulasi ulang atau menciptakan pendekatan baru untuk dapat merespon terhadap keberadaan narkoba di Thailand, hal itulah yang dilakukan Anutin yang kemudian meyakinkan masyarakat dalam hal ini disebut *audience* untuk merubah bahasa terhadap ganja dari jenis zat narkoba ilegal menjadi herbal terkontrol sehingga masyarakat dapat menggunakannya, perubahan struktur bahasa yang dilakukan Anutin selaku aktor desekuritisasi adalah bentuk dari perubahan dari bahasan keamanan menjadi pembahasan kebijakan yang kemudian menjadikan isu legalisasi ganja sebagai langkah desekuritisasi dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Ananda, V. S. (2022). Analisis Kebijakan Legalisasi Ganja di Thailand Pada Tahun 2022 di Tengah Agenda War On Drugs [Universitas Negeri Surakarta]. In *digilib.uns.ac.id* (Vol. 4, Issue 8.5.2017). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/101406/Analisis-Kebijakan-Legalisasi-Ganja-di-Thailand-Pada-Tahun-2022-di-Tengah-Agenda-War-On-Drugs>
- Aroonsrimorakot, S., Laiphrakpam, M., & Metadilogkul, O. (2019). Social, religious, recreational and medicinal usage of cannabis in India and Thailand. *Journal of Thai Interdisciplinary Research*, 14(4), 43–50.
- Balzacq, T. (2005). The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context. *European Journal of International Relations*, 11(2), 171-201. <https://doi.org/10.1177/1354066105052960>
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Frame Work for Analysis*.
- Cohen, J. (2004). *Not Enough Graves: The War on Drugs, HIV/AIDS, and Violations of Human Rights*. 16(8), Vol. 16, No. 8.
- Coskun, B. (2009). *Analysing Desecuritization: The Case of Israeli and Palestinian Peace Education and Water Management* [Loughborough University]. https://www.academia.edu/107356767/Analysing_desecuritisation_the_case_of_Israeli_and_Palestinian_peace_education_and_water_management
- Djatmiko, A. (2023). *Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional: Implementasi Teori Sekuritisasi dalam kasus Narkoba Global* (A. Kika (ed.); Edisi 1). ANDI, Anggota IKAPI, Yogyakarta. <https://play.google.com/books/reader?id=gzaqEAAAQBAJ&pg=GBS.PR2>
- Jainah, Z. O. (2013). KEJAHATAN NARKOBA SEBAGAI FENOMENA DARI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME ZAINAB OMPU JAINAH Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. *Pranata Hukum*, 8(2), 96–103.
- Kama, I. P. S., Prameswari, A. A. A. I., & Sushanti, S. (2019). Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja. *OJS Jurnal*, 2(Vol. 2 Nomor 3), 1–15.
- Katasila, S. (2022). *Social Movements on Liberalization " Free Marijuana " of Thai ' s Government Policy : Freedom under Boundaries*. 6(2), 2191–2208.
- Laohavanich, M. (2022). Political economy of cannabis in Thailand. *Chula Med J*, 66(1), 115–122. <https://doi.org/10.14456/clmj.2022.15>

- Lutfiyani, Dini, S. ., Hamzani, D. A. I., & Rizkianto, Kus, M. . (2023). *Kontroversi Ganja Untuk Medis Perbandingan Indonesia dan Thailand* (M. A. . Khasanah, Dr. Nur (ed.); Edisi 1). PT Nasya Expanding Managemeny. <https://play.google.com/books/reader?id=O-atEAAAQBAJ&pg=GBS.PR4>
- Pratama, A. Y. U.; L. S. (2023). STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA. *Parkesia*, 1(62), 70–81. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>
- Ramadhan, R. D. (2021). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMFASILITASI NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK UNI EMIRAT ARAB-ISRAEL* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/83841/>
- Sommano, S. R., Tangpao, T., Pankasemsuk, T., Ponpanumas, V., Phimolsiripol, Y., Rachtanapun, P., & Prasad, S. K. (2022). Growing ganja permission: a real gate-way for Thailand’s promising industrial crop? *Journal of Cannabis Research*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s42238-022-00121-4>
- Tanguay, P. (2024). *ORGANIZED CRIME SERIES CANNABIS IN THAILAND* (Issue January). <https://globalinitiative.net/>
- Tarigan, M. I., & Collins, J. S. (2019). Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California’s Adult Use of Marijuana Act Maria. *Padjadjaran Law Review*, 7(1), 22.
- Tobing, F. B. L. (2002). Aktivitas Drug Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara. *Jurnal Politik Internasional*, 5(1), 75–86. <https://doi.org/10.7454/global.v5i1.320>
- Waever, O. (1995). Securitization and Desecuritization. *On Security, Chapter 3*, 85–98. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814761373.003.0005>

